

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdullah, Rozali, 1986, *Hukum Kepegawaian*, CV. Rajawali, Jakarta.
- Admosudirjo, Prayudi, 1988, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ali, Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Dawi, Amir Hassan. 2002. *Pentecorian Sosiologi dan Pendidikan (Edisi kedua)*, Tanjong Malim Perak, Quantum Books.
- Fukuyama, Francis, 2014, *Political Order and Political Decay (From the Industrial Revolution to the Globalization of Democracy)*, Farrar, Straus and Giroux, New York.
- Gie, The Liang, 1983, *Unsur-Unsur Administrasi*. Super Sukses, Yogyakarta.
- Hadjon, Philipus M., 1993, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- _____, 1994, *Fungsi Normatif Hukum Administrasi Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*, Universitas Airlangga, Surabaya.
- Handayaniingrat, Sumarmo, 1980, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Pengolahan*, Inti Daya Press, Jakarta.
- HR, Ridwan, 2011, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Kaloh, J., 2009, *Kepemimpinan Kepala Daerah: Pola Kegiatan, Kekuasaan, dan Perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marbun, SF., *Peradilan Administrasi dan Upaya Administratif di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Marsono, 1974, *Pembahasan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian*, Ikhtiar Baru, Jakarta.
- MD, Moh. Mahfud, 1998, *Hukum Kepegawaian Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- ND Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

- Nugraha, Safri dkk, 2007, *Hukum Administrasi Negara*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Patah, Nanang, 1996, *Landasan Manajemen Pendidikan*, Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Pramusinto, Agus, 2009, *Mengembangkan Budaya Kepemimpinan Profesional Birokrasi*, Gava Media, Yogyakarta.
- Purbopranoto, Kuntjoro, 1975, *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintah dan Peradilan Administrasi Negara*, Alumni, Bandung.
- Ridwan, Juniarso dan Achmad Sodik Sudrajat, 2012, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Nuansa, Bandung.
- Siagian, Sondang P., 1984, *Filsafat Administrasi*, Gunung Agung, Jakarta.
- _____, 1992, *Kerangka Dasar Dalam Administrasi*. Jakarta. Rineka Cipta.
- _____, 1999, *Teori Motivasi dan Aplikasinya*. Jakarta. Bina Aksara.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 1986, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Sumardjono, Maria S.W., 1997, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, Gramedia, Jakarta.
- Tjandra, W. Riawan, 2014, *Hukum Sarana Pemerintahan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Triwulan Titik dan Ismu Gunadi Widodo, 2011, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Skripsi, Tesis, Desertasi:
- Kasimin, “Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Mekanisme Pengangkatan Pegawai dalam Jabatan Struktural dan Manajemen Pengembangan Karir Pegawai di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jambi”, *Tesis*, Magister Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 2008.

Ngadiran, 2010, “Implementasi Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) dalam Pengangkatan Pejabat Struktural di Pemerintah Daerah Gunungkidul”, *Tesis*, Magister Hukum Kenegaraan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Puguh Trihatmoko, 2013, “Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural di Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam Perspektif Hukum Kepegawaian”, *Tesis*, Magister Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Ratih Rohani, 2015, “Implikasi Promosi Jabatan Secara Terbuka Terhadap Manajemen Aparatur Sipil Negara di Indonesia”, *Tesis*, Magister Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Richo Andi Wibowo, 2017, Preventing Maladministration in Indonesian Public Procurement (A Good Public Procurement Law Approach and Comparison with The Netherlands and The United Kingdom), *Desertasi*, Universitas Utrecht, Belanda.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194).

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164).

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887).

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037).

Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2016 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah.

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Struktural yang Lowong Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Surat Edaran dari Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten Nomor: 800/ 1241/ 29 perihal Uji Kompetensi.

Surat Edaran dari Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten Nomor: 800/ 1252/ 29 perihal Ralat Uji Kompetensi.

Internet:

Afandri Adya, “Meritokrasi Dalam Kultur Masyarakat Indonesia”, https://www.academia.edu/4564865/Meritokrasi_Dalam_Kultur_Masyarakat_Indonesia, diakses Selasa Tanggal 19 September 2017.

Bayu Hermawan, <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/03/21/nlk3tt-menpanrb-lelang-jabatan-eselon-i-dan-ii-wajib-dilaksanakan> Sabtu, 21 March 2015, 17:01 WIB.

Danar Widiyanto, “Mau Tau Harga Jabatan di Klaten? Ini Dia”, http://krjogja.com/web/news/read/20507/Mau_Tahu_Harga_Jabatan_di_Klaten_Ini_Dia, diakses Senin, 18 September 2017 / 11:42:22 WIB.

Dapur Ilmiah Sahabat Para Akademisi, “ Analisis Data Kualitatif”,
<http://dapurilmiah.blogspot.co.id/2014/06/analisis-data-kualitatif.html>,
diakses Minggu, 22 Januari 2017, 03.14 WIB.

Laode Muhammad Syarif, Wakil Ketua KPK yang dimuat dalam Republika.co.id,
12 Januari 2017, diakses Sabtu, 13 Januari 2018 pukul 17:23 WIB.

Oscar Ferri, “KPK Tangkap Tangan Bupati Klaten”, <http://news.liputan6.com/read/2691868/kpk-tangkap-tangan-bupati-klaten>, diakses pada Tanggal
30 Desember 2016 Pukul 11:16 WIB.

Srikandi Rahayu, “Pengertian dan Prinsip Good Governance”,
<http://seputarpengertian.blogspot.co.id/2015/12/pengertiandanprinsipgoodgovernance.html>, diakses Rabu, 20 September 2017 Pukul 12:43 WIB.

Yudi Latif, “Demokrasi dengan Meritokrasi”, <http://www.republika.co.id/berita/kolom/teh-anget/14/03/12/n29mza-demokrasi-dengan-meritokrasi>, diakses
Senin Tanggal 17 September 2017, Pukul 08:38 WIB.

Putusan:

Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri/ Niaga/ HI/ Tipikor Semarang, *Salinan Putusan Perkara Tipikor atas nama terdakwa Sri Hartini*, Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg, Tanggal 18 September 2017, Semarang.

Surat Kepala BKN Nomor: K. 26-30/V.108-6/99 tanggal 4 November 2016 perihal Penjelasan Atas Beberapa Permasalahan Kepegawaian Sebagai Dampak Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Surat Tuntutan KPK Nomor: TUT-54/24/08/2017 atas nama terdakwa Sri Hartini, tanggal 28 Agustus 2017, Jakarta.

Legal Opinion:

Richo Andi Wibowo, 2018, “Opsis untuk Pemkab Rembang pasca lahirnya SE Mendagri 500/3231/SJ dan dicabutnya Permendagri Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah”, *Legal Opinion*, Departemen Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta.